

# LAPORAN

## MONITORING PELAYANAN INFORMASI BULAN MEI TAHUN 2017



SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN  
2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## Kata Pengantar

Salah satu kegiatan Sub Bagian Humas dan Tata Usaha adalah menerima dan memberikan layanan informasi terhadap pengaduan masyarakat ataupun permintaan informasi yang masuk. Permintaan maupun pengaduan yang masuk dari masyarakat merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Opini publik pun dapat terjadi dari hal tersebut, bagaimana BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menangannya dan menyelesaikan pengaduan masyarakat akan dinilai oleh pihak-pihak di luar BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengaduan maupun informasi dari masyarakat mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tumpuan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabilitas dan transparan yang bersih, bebas dari KKN. Pengaduan ini bisa disampaikan secara langsung, surat maupun melalui email. Isi dari pada pengaduan masyarakat ini bermacam-macam, dimana mayoritas menghendaki agar segala bentuk kecurangan yang terjadi yang menyangkut pengelolaan keuangan negara haruslah dibenahi.

Untuk mendapatkan masukan dan informasi tentang segala sesuatu yang dinformasikan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, dibuatlah monitoring yang memuat informasi tersebut. Hasil monitoring ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi siapa saja yang berkepentingan.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat akan keberadaan BPK RI dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang transparan dan akuntabel.

Mataram, Juni 2017

**Ketua PIK**



**Ida Bagus Ketut Wisnu**  
NIP. 196711291994031002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
RESUME ANALISIS PELAYANAN INFORMASI .....	3
I PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN SALURAN INFORMASI	4
II PERSENTASE PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN KATEGORI .....	4
III PERSENTASE PELAYANAN INFORMASI YANG DITANGGAPI (KESELURUHAN) .....	5
IV REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI .....	5

**RESUME ANALISIS PELAYANAN INFORMASI  
DI BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
BULAN MEI TAHUN 2017**

No.	KLASIFIKASI	:	URAIAN
<b>1.</b>	<b>Kategori</b>		
	a) Permohonan / Penyampaian Informasi	:	0
	b) Pengaduan Masyarakat	:	0
	c) Komplain Informasi	:	0
<b>2.</b>	<b>Saluran</b>		
	a) Website	:	0
	b) Surat/Email	:	0
	c) Langsung	:	0
<b>3.</b>	<b>Leading Topik</b>		
	a) Permohonan / Penyampaian Informasi	:	-
	b) Pengaduan Masyarakat	:	-
	c) Komplain Informasi	:	-
<b>4.</b>	Topik yang perlu mendapat perhatian		
	a) Permohonan / Penyampaian Informasi	:	-
	b) Pengaduan Masyarakat	:	-
	c) Komplain Informasi	:	-

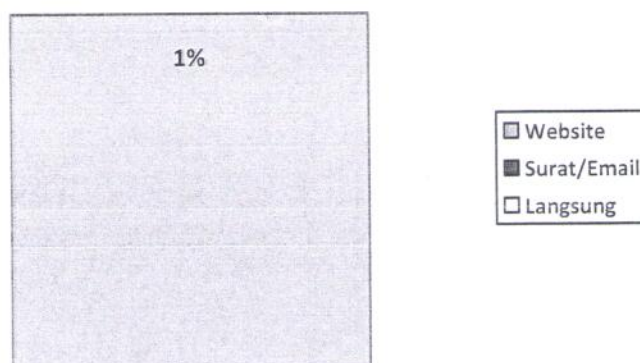
## **I. PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN SALURAN INFORMASI**

Pada Bulan Mei Tahun 2017, analisis kuantitatif pelayanan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditanggapi berdasarkan saluran website, surat atau e-mail, maupun datang langsung adalah sebagai berikut:

No.	Saluran	Jumlah	Persentase
1	Website	0	0%
2	Surat/Email	0	0%
3	Langsung	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Dari tabel di atas diketahui bahwa permintaan informasi/pengaduan masyarakat/komplain informasi yang masuk melalui surat/email sebanyak 0% (NIHIL).

**Gambar 1.1 Persentase Pelayanan Informasi Yang Masuk Berdasarkan Saluran**



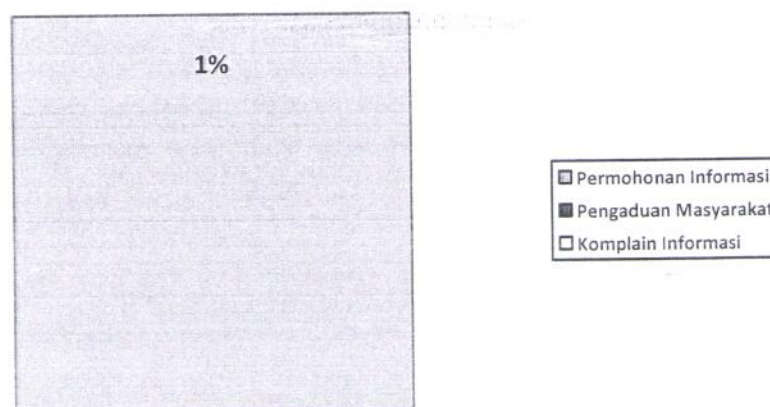
## **II. PERSENTASE PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN JENIS INFORMASI**

Pada Bulan Mei Tahun 2017, analisis kuantitatif pelayanan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masuk berdasarkan kategori permohonan/penyampaian informasi (PI), pengaduan masyarakat (PM), dan komplain informasi (KI), adalah sebagai berikut:

No.	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Permohonan/ Penyampaian Informasi	0	0%
2	Pengaduan Masyarakat	0	0%
3	Komplain Informasi	0	0%
2	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tidak ada permintaan layanan informasi selama bulan Mei 2017.

**Gambar 2.1 Persentase Pelayanan Informasi Berdasarkan Kategori**



### **III. PERSENTASE PELAYANAN INFORMASI YANG DITANGGAPI**

Pada Bulan Mei Tahun 2017, analisis kuantitatif pelayanan informasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditanggapi adalah NIHIL.

### **IV. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI**

#### **Pelayanan Informasi yang Ditanggapi**

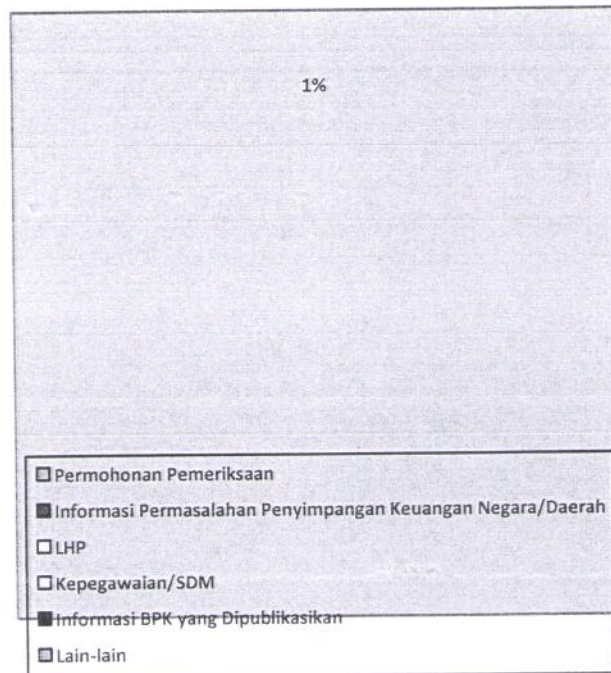
Pada Bulan Mei Tahun 2017, analisis kuantitatif pelayanan informasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditanggapi adalah sebagai berikut:

#### **a. Persentase Pelayanan Informasi yang Ditanggapi**

Pada Bulan Mei Tahun 2017, pelayanan informasi adalah NIHIL. Adapun topik permohonan/penyampaian informasi dan pengaduan masyarakat yang sudah ditanggapi tersebut dikategorikan sebagai berikut:

No.	Topik	Jumlah	Persentase
1	Permohonan Pemeriksaan	0	0%
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	0	0%
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	0	0%
4	Kepegawaian/ SDM	0	0%
5	Informasi BPK Yang Dipublikasikan	0	0
6	Lain-lain	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Gambar 4.2 Persentase Topik Layanan Informasi







# LAPORAN

## MONITORING PELAYANAN INFORMASI BULAN JUNI TAHUN 2017



### SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN 2017

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

## Kata Pengantar

Salah satu kegiatan Sub Bagian Humas dan Tata Usaha adalah menerima dan memberikan layanan informasi terhadap pengaduan masyarakat ataupun permintaan informasi yang masuk. Permintaan maupun pengaduan yang masuk dari masyarakat merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Opini publik pun dapat terjadi dari hal tersebut, bagaimana BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menanganinya dan menyelesaikan pengaduan masyarakat akan dinilai oleh pihak-pihak di luar BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengaduan maupun informasi dari masyarakat mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tumpuan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabilitas dan transparan yang bersih, bebas dari KKN. Pengaduan ini bisa disampaikan secara langsung, surat maupun melalui email. Isi dari pada pengaduan masyarakat ini bermacam-macam, dimana mayoritas menghendaki agar segala bentuk kecurangan yang terjadi yang menyangkut pengelolaan keuangan negara haruslah dibenahi.

Untuk mendapatkan masukan dan informasi tentang segala sesuatu yang dinformasikan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, dibuatlah monitoring yang memuat informasi tersebut. Hasil monitoring ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi siapa saja yang berkepentingan.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat akan keberadaan BPK RI dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang transparan dan akuntabel.

Mataram, Juli 2017

**Ketua PIK**



Ida Bagus Ketut Wisnu  
NIP. 196711291994031002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
RESUME ANALISIS PELAYANAN INFORMASI .....	3
I PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN SALURAN INFORMASI	4
II PERSENTASE PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN KATEGORI .....	4
III PERSENTASE PELAYANAN INFORMASI YANG DITANGGAPI (KESELURUHAN) .....	5
IV REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI .....	5

**RESUME ANALISIS PELAYANAN INFORMASI  
DI BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
BULAN JUNI TAHUN 2017**

No.	KLASIFIKASI	URAIAN
<b>1.</b>	<b>Kategori</b>	
	a) Permohonan / Penyampaian Informasi	: 0
	b) Pengaduan Masyarakat	: 1
	c) Komplain Informasi	: 0
<b>2.</b>	<b>Saluran</b>	
	a) Website	: 0
	b) Surat/Email	: 0
	c) Langsung	: 1
<b>3.</b>	<b>Leading Topik</b>	
	a) Permohonan / Penyampaian Informasi	: -
	b) Pengaduan Masyarakat	: Dugaan penyimpangan keuangan negara
	c) Komplain Informasi	: -
<b>4.</b>	<b>Topik yang perlu mendapat perhatian</b>	
	a) Permohonan / Penyampaian Informasi	: -
	b) Pengaduan Masyarakat	: -
	c) Komplain Informasi	: -

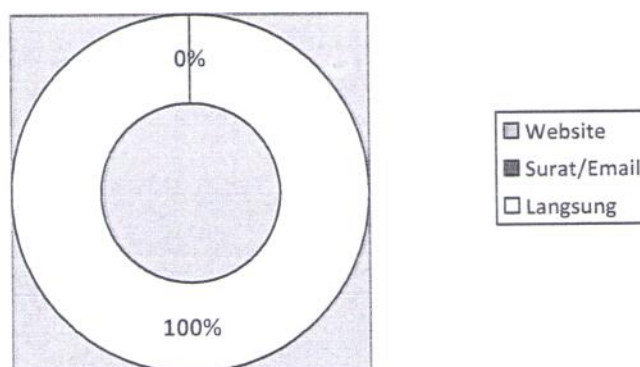
## I. PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN SALURAN INFORMASI

Pada Bulan Juni Tahun 2017, analisis kuantitatif pelayanan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditanggapi berdasarkan saluran website, surat atau e-mail, maupun datang langsung adalah sebagai berikut:

No.	Saluran	Jumlah	Persentase
1	Website	0	0%
2	Surat/Email	0	0%
3	Langsung	1	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas diketahui bahwa permintaan informasi/pengaduan masyarakat/komplain informasi yang masuk secara langsung sebanyak 100%.

**Gambar 1.1 Persentase Pelayanan Informasi Yang Masuk Berdasarkan Saluran**



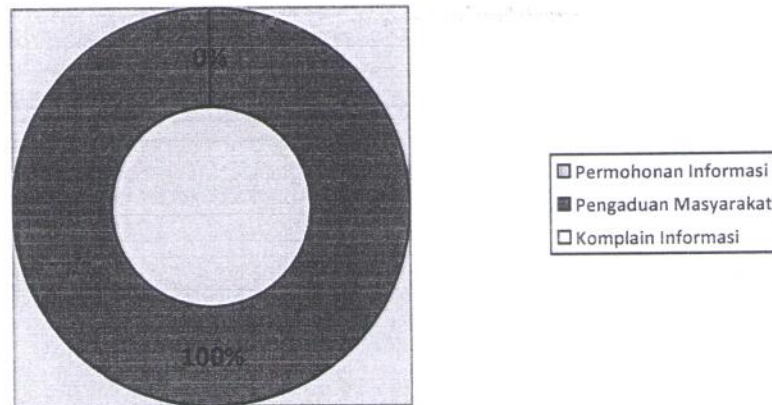
## II. PERSENTASE PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN JENIS INFORMASI

Pada Bulan Juni Tahun 2017, analisis kuantitatif pelayanan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masuk berdasarkan kategori permohonan/penyampaian informasi (PI), pengaduan masyarakat (PM), dan komplain informasi (KI), adalah sebagai berikut:

No.	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Permohonan/ Penyampaian Informasi	0	0%
2	Pengaduan Masyarakat	1	100%
3	Komplain Informasi	0	0%
2	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa permintaan layanan informasi selama bulan Juni 2017 adalah 1 pengaduan masyarakat.

**Gambar 2.1 Persentase Pelayanan Informasi Berdasarkan Kategori**



### **III. PERSENTASE PELAYANAN INFORMASI YANG DITANGGAPI**

Pada Bulan Juni Tahun 2017, analisis kuantitatif pelayanan informasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditanggapi adalah 100%.

### **IV. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI**

#### **Pelayanan Informasi yang Ditanggapi**

Pada Bulan Juni Tahun 2017, analisis kuantitatif pelayanan informasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditanggapi adalah sebagai berikut:

#### **a. Persentase Pelayanan Informasi yang Ditanggapi**

Pada Bulan Juni Tahun 2017, pelayanan informasi adalah 100%. Adapun topik permohonan/penyampaian informasi dan pengaduan masyarakat yang sudah ditanggapi tersebut dikategorikan sebagai berikut:

No.	Topik	Jumlah	Persentase
1	Permohonan Pemeriksaan	0	0%
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	1	100%
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	0	0%
4	Kepegawaian/ SDM	0	0%
5	Informasi BPK Yang Dipublikasikan	0	0
6	Lain-lain	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

Gambar 4.2 Persentase Topik Layanan Informasi



b. Rincian Layanan Informasi  
- Permohonan/Penyampaian Informasi

NO	Waktu		Instansi	Jabatan	Permintaan Informasi	Tujuan Penggunaan Informasi	Tindak Lanjut
	Permintaan	Jawab/Selesai					
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- Pengaduan Masyarakat

NO	Jenis Aduan Masyarakat	Pemberi Aduan	Saluran Pengaduan	Ditindaklanjuti	Belum Dapat Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Keterangan
1.	Unjuk rasa terkait pekerjaan cetak sawah baru Dinas Perwalian Provinsi NTB	PERANK	Langsung	√	-	-	sudah ditindaklanjuti



**LAPORAN KRONOLOGIS DEMONSTRASI  
DARI PERSATUAN RAKYAT ANTI KORUPSI (PERANK) NTB  
TERHADAP BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NTB**

Pada Hari Senin, 12 Juni 2017, pukul 12.00 WITA, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTB didatangi rombongan demonstran sejumlah kira-kira 30 orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Persatuan Rakyat Anti Korupsi (PERANK) NTB.

Dalam orasinya, PERANK NTB menyatakan bahwa Dinas Pertanian Provinsi NTB selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pengawas dalam Program Cetak Sawah Baru di Provinsi NTB merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Pertanian RI untuk mengawasi pekerjaan cetak sawah baru yang dikerjakan oleh Mitra ZENI TNI AD (pelaksana cetak sawah baru). Akan tetapi, ada persoalan pembayaran yang dibayarkan oleh ZENI TNI AD kepada Mitra kerjanya dinilai tidak sesuai dengan kontrak yang seharusnya dibayar 9jt/ha, tetapi hanya dibayar 8jt/ha di Pulau Lombok dan 8,5jt/ha di Pulau Sumbawa. Beberapa kali mitra kerja memasukkan surat kepada Dinas Pertanian Provinsi NTB untuk menyelesaikan persoalan ini tetapi tidak direspon.

Atas permasalahan tersebut, dalam pernyataan sikapnya para demonstran dari PERANK NTB ini meminta kepada BPK Perwakilan Provinsi NTB untuk melakukan audit dan investigasi harta kekayaan Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB.

Kepala Subauditorat NTB II, Achmad Fauzi Amin, Pengendali Teknis, Sulistyoningsih, dan Ketua Tim Senior, Warsaya, telah menemui para demonstran dan mendengarkan aspirasi mereka. Kepala Subauditorat NTB II menjelaskan bahwa tuntutan mereka adalah terkait proyek yang didanai oleh APBN, dalam hal ini berasal dari anggaran Kementerian Pertanian, sehingga BPK Perwakilan Provinsi NTB tidak punya wewenang untuk memeriksa karena BPK Perwakilan hanya memeriksa APBD. Beliau menyarankan agar PERANK bersurat langsung ke BPK Pusat terkait pengaduan mereka.

Sekitar pukul 12.30 WITA, para demonstran membubarkan diri. Tidak ada aksi anarkis dalam demonstrasi kali ini.

